



**LAPORAN
CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN I
TAHUN 2025**



PALANGKA RAYA, APRIL 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I KINERJA	1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJ UTAMA (IKU)	1
❖ PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	1
❖ PERJANJIAN KINERJA	2
❖ TARGET KINERJA	3
❖ TARGET REALISASI KEUANGAN	4
 BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	 7
❖ KENDALA DAN MASALAH	7
❖ TINDAK LANJUT PERMASALAHAN	12
 BAB III PENUTUP	 15
 LAMPIRAN	 16 - 20

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah telah menyelesaikan penyusunan dokumen *"LAPORAN CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN I TAHUN 2025"*. Laporan capaian kinerja ini merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang AKIP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.

Laporan capaian kinerja Triwulan I Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun untuk mendapatkan gambaran setiap triwulannya dan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Disamping itu kami menyadari bahwa sajian buku laporan ini masih belum sempurna seperti apa yang diharapkan, untuk itu kami mengharapkan masukan saran yang berarti untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini untuk yang akan datang.

Demikian laporan capaian kinerja Triwulan I Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah ini kami susun agar dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan kami ucapkan terima kasih.

Palangka Raya, April 2025

INSPEKTUR DAERAH,



SARING SH., MH., CGCAE
Jaksa Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

BAB
I

KINERJA

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Komitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem LKIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan ketentuan dalam penyusunan LKIP, dimanifestasikan melalui perumusan dan penetapan aspek-aspek yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program/kegiatan adalah sebagai berikut :

❖ Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Selesai: - BPK RI - Itjen Kemendagri/ Teknis lainnya - Inspektorat	Jlh TL Hasil Temuan Selesai = $\frac{\text{Jlh TL Hasil Temuan Selesai}}{\text{Total jumlah temuan}} \times 100\%$	Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD Lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	Hasil dari Penilaian Tim BKP RI	Hasil penilaian WTP dari BPK RI
3.	Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan	(Nilai kerugian daerah pada tahun sebelumnya) – (nilai kerugian daerah tahun bersangkutan) $\frac{\text{Nilai kerugian daerah pada tahun sebelumnya} - \text{Nilai kerugian daerah pada tahun bersangkutan}}{\text{Nilai kerugian daerah pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD Lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal “B”	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal “B”	Jumlah SKPD yang memperoleh nilai evaluasi “B” $\frac{\text{Jumlah SKPD yang memperoleh nilai evaluasi “B”}}{\text{Jumlah SKPD yang di evaluasi SAKIP}} \times 100$	Kegiatan evaluasi kinerja SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Tengah
5.	Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Tingkat Maturitas SPIP dari hasil Penilaian Tim	Hasil penilaian Leveling APIP dari BPKP Pusat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
6.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Leveling APIP dari hasil Penilaian Tim	Hasil Penilaian Leveling APIP dari BPKP Pusat

❖ Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase tindak lanjut selesai - BKP- RI	%	75
		- ITJEN Kemendagri/ teknis lainnya	%	75
		- Inspektorat	%	85
2.	Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP
3.	Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	30
4.	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	% SKPD Nilai LKIP Min B	85
5.	Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Tingkat Maturitas	Level 3
6.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Leveling	Level 3

Program / Kegiatan Utama :

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.278.430.000,00	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.270.980.000,00	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.007.450.000,00	

❖ Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase tindak lanjut selesai : BKP- RI	%	75	75	75	75	75	
		ITJEN Kemendagri/ teknis lainnya	%	75	75	75	75	75	
		Inspektorat	%	85	85	85	85	85	
2.	Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	-	WTP	-	-	
3.	Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	30	30	30	30	30	
4.	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	% SKPD Nilai LKIP Min B	85	-	85	-	-	
5.	Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Tingkat Maturitas	Level 3	-	-	-	Level 3	
6.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Leveling	Level 3	-	-	-	Level 3	

❖ Target Realisasi Keuangan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Realisasi Keuangan (Rp)	
			TW I	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	35.771.154.747,00	4.948.692.102,00	
1	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000,00	9.830.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.000.000,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15.000.000,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15.000.000,00	0,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	4.830.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.127.749.228,00	4.346.494.701,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.857.749.228,00	4.346.494.701,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.000.000,00	0,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.900.000,00	0,00	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.900.000,00	0,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.415.500.000,00	0,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	325.500.000,00	0,00	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.090.000.000,00	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.668.565.519,00	207.664.486,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.000.000,00	0,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.435.000.000,00	0,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	297.600.000,00	37.430.550,00	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	414.918.519,00	116.348.796,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.047.000,00	0,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000,00	0,00	

LKIP TRIWULAN I 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Realisasi Keuangan (Rp)	
			TW I	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.000.000,00	53.885.140,00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.840.000,00	242.857.715,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000,00	0,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.440.000,00	67.734.585,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	4.775.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.000.000,00	170.348.130,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.273.600.000,00	141.845.200,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.600.000,00	4.467.700,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.000.000,00	137.377.500,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.680.000.000,00	0,00	
II PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.278.430.000,00	664.895.100,00	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4.270.980.000,00	95.680.000,00	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.000.000,00	0,00	
	Reviu Laporan Kinerja	805.394.000,00	0,00	
	Reviu Laporan Keuangan	145.000.000,00	0,00	
	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	6.980.000,00	
2	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.653.366.000,00	0,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	367.220.000,00	88.700.000,00	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2.007.450.000,00	569.215.100,00	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	647.800.000,00	2.800.000,00	
		1.359.650.000,00	566.415.100,00	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Realisasi Keuangan (Rp)	
			TW I	
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.903.817.928,00	200.591.500,00	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	136.123.000,00	0,00	
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	136.123.000,00	0,00	
	Pendampingan dan Asistensi	2.767.694.928,00	200.591.500,00	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	275.200.000,00	4.200.000,00	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	316.200.000,00	0,00	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	824.982.495,00	0,00	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.351.312.433,00	196.391.500,00	



PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

KENDALA DAN MASALAH

Tabel 2.1
Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan I			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase tindak lanjut selesai : BKP- RI	%	75	75	78,04	104,05	
		ITJEN Kemendagri/ teknis lainnya	%	75	75	25,76	34,35	
		Inspektorat	%	85	85	83,71	98,48	
2.	Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	-	-	-	
3.	Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	30	30	88,89	296,30	
4.	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Mininal "B"	% SKPD Nilai LKIP Min B	85	-	-	-	
5.	Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Tingkat Maturitas	Level 3	-	-	-	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan I			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
6.	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Leveling	Level 3	-	-	-	

Dari hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dapat dijelaskan dan di evaluasi berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Staregik SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

SASARAN 1
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini menggunakan indikator kinerja, yaitu **Persentase tindak lanjut selesai.**

Untuk mengukur sasaran pertama ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja berikut di bawah ini, yaitu:

- a. Persentase tindak lanjut selesai temuan BPK-RI
- b. Persentase tindak lanjut selesaitemuan ITJEN Kemendagri/ Teknis lainnya
- c. Persentase tindak lanjut selesai temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut selesai

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Tahun 2025 (%)		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase tindak lanjut selesai					
	- BPK-RI	76,39	76,39	75,00	78,04	104,05
	- Itjen Kemendagri/ Teknis lainnya	67,61	71,74	75,00	25,76	34,35
	- Inspektorat	85,02	84,43	85,00	83,71	98,48

Capaian Indikator kinerja Tahun 2025 triwulan I berdasarkan laporan per bulan Maret 2025, untuk kegiatan pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI, Itjen Kemendagri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah baru dilaksanakan di bulan April Tahun 2025.

Hambatan/Masalah :
Hambatan atau permasalahan secara umum terhadap hasil pemeriksaan yang belum tuntas disebabkan beberapa hal, seperti:

- Adanya mutasi/pensiun/meninggal dunia Auditor sehingga kesulitan dalam proses penyelesaian tindak lanjut.
- Adanya aparat yang belum memahami akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Aparat/pejabat yang diperiksa belum memahami bentuk tindak lanjut yang harus diselesaikan.
- Saat ini semakin banyaknya tugas-tugas baik di Inspektorat maupun pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga fokus pada penyelesaian Tindak Lanjut berkurang.

SASARAN 2

Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil capaian indikator Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal yaitu berupa Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (LKPD Pemprov Tahun 2024) yang dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah belum dapat disajikan dikarenakan pemeriksaan tersebut masih dilaksanakan/belum selesai.

Tabel 2.3
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Opini BPK-RI

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Tahun 2025 (%)		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	WTP	-	-

Hambatan/Masalah :

Hambatan atau permasalahan secara umum yang dihadapi adalah Perangkat Daerah belum secara penuh menyampaikan Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam penyampaian informasi di Laporan Keuangan belum maksimal.

SASARAN 3

Menurunnya Nilai Kerugian Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan

Indikator Kinerja persentase penurunan nilai kerugian hasil pemeriksaan dalam hal ini yaitu persentase penurunan nilai kerugian hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 terhadap hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.

Program yang menunjang pencapaian indikator Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan yaitu Peningkatan tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pada kegiatan Pengawasan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada Perangkat Daerah yaitu Pemeriksaan Reguler Tahun 2025 yang rencananya dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 /Triwulan III terhadap 46 (empat puluh enam) Perangkat Daerah dan Pemeriksaan pengaduan masyarakat atas penyimpangan oleh penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah serta Pengawasan terhadap Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase penurunan Nilai Kerugian Daerah sesuai hasil pemeriksaan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Menurunnya Nilai Kerugian Daerah sesuai Hasil Pemeriksaan

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Tahun 2025 (%)		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penurunan Nilai Kerugian Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan	30,77	88,89	30,00	88,89	296,30

Capaian Indikator kinerja Tahun 2025 triwulan I masih sama dengan realisasi Tahun 2024 disebabkan menurunnya nilai Kerugian Negara dan Kerugian Daerah (KNKD) sesuai hasil pemeriksaan baru dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah setelah penyampaian hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.

Hambatan/Masalah :

Hambatan atau permasalahan secara umum disebabkan beberapa hal, seperti:

1. Status kelembagaan APIP yang setara dengan Perangkat Daerah lain menjadi kendala dalam hal pengawasan dan pembinaan;
2. Banyak Rekomendasi yang sudah lama sehingga dalam proses Tindak Lanjut sangat sulit;
3. Belum berjalan secara maksimal Tim TPTGR yang telah dibentuk.

SASARAN 4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Persentase (%) SKPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP pada Tahun 2025 untuk SAKIP Tahun 2024 baru dilaksanakan pada Bulan April 2025.

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Tahun 2025 (%)		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase (%) Perangkat Daerah yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	76,31% (38 PD)	89,74% (39 PD)	85%	-	-

Hambatan/Masalah :

Hambatan atau permasalahan secara umum terhadap hasil pemeriksaan yang belum tuntas disebabkan beberapa hal, seperti:

- Hasil evaluasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan atau feedback dalam pembuatan Laporan di tahun berikutnya;
- Laporan akuntabilitas kinerja masih dianggap sebagai pemenuhan pelaporan saja karena masih banyak kekurangan terutama dari segi perencanaan dan evaluasi pencapaian target kinerja untuk IKU;
- Hasil rekomendasi dari Evaluasi SAKIP juga masih secara umum, belum spesifik apa yang harus diperbaiki.

SASARAN 5

Meningkatnya Manuritas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah

Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mengukur tingkat keberhasilan Pemda dalam penyelenggaraan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dalam menunjang mencapai misi kelima Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA Inspektorat periode 2021-2026 yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi"**.

Pengukuran dan evaluasi kinerja sasaran strategis ini berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, yaitu Laporan Hasil Quality Assurance (QA) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah masih dalam proses.

Tabel 2.6
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Maturitas SPIP

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Tahun 2025 (%)		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Level 3	Level 3	Level 3	-	-

Hambatan/Masalah :

Hambatan atau permasalahan secara umum terhadap hasil pemeriksaan yang belum tuntas disebabkan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Daerah Belum Maksimal.

SASARAN 6

Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil capaian indikator Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 belum dapat disajikan dikarenakan pemeriksaan tersebut masih dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan tengah.

Tabel 2.7
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi (%)		Tahun 2025 (%)		
		2023	2024	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Level 3	Level 3	Level 3	-	-

Tindak Lanjut Permasalahan

- a. Sasaran I : Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Upaya yang dilaksanakan :

- Dengan membuat Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak untuk temuan yang terkait kerugian keuangan.

- Diupayakan menagih secara langsung ke obyek terkait dan dengan membuat surat kepada semua obyek pemeriksaan baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar segera menyelesaikan tindaklanjutnya.

b. Sasaran II : Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Upaya yang dilaksanakan dalam hal pembinaan ke Perangkat Daerah harus menerapkan sistem Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sasaran III : Menurunnya Nilai Kerugian Daerah Sesuai Hasil Pemeriksaan.

Upaya yang dilaksanakan :

- Melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih intens lagi kepada Perangkat Daerah.
- Melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDM) APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melalui:
 - Pengiriman APIP untuk mengikuti Diklat/Bimtek;
 - Melaksanakan Diklat pada kantor sendiri atau Pelaksanaan Pelatihan Mandiri/PPM (mendatangkan narasumber dari luar); dan
- Melakukan sosialisasi dalam kegiatan pembinaan kepada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan menyediakan Ruang Konsultasi pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

d. Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Upaya yang dilaksanakan :

- Melakukan koordinasi mulai perencanaan, pelaporan, dan evaluasi terkait Indikator Kinerja Perangkat Daerah antara BAPPEDALITBANG, Biro Organisasi Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyusunan Indikator Utama Perangkat Daerah.
- Melakukan komunikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang menjadi target prioritas/sampel dari evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan & RB dalam penyusunan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pada saat kegiatan evaluasi LKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan LKIP Pemerintah Provinsi oleh Kemenpan & RB.

e. Sasaran V : Meningkatnya Manuritas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah

Upaya yang dilaksanakan :

- Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi Satgas Sistem Pengendalian Intern (SPIP) lingkup Perangkat Daerah dan Provinsi dengan pelatihan implementasi SPIP serta memberi dukungan sumber daya yang memadai.
- Mensosialisasikan SPIP termasuk kebijakan dan prosedur kepada seluruh ASN agar mereka memahami arti pentingnya SPIP dan terbentuk kepeduliannya untuk ber-SPIP.
- Menyusun rencana pengembangan SPIP secara komprehensif dan mengembangkan pengendalian intern pada seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;

f. Sasaran VI : Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

Upaya yang dilaksanakan :

- Meningkatkan SDM APIP melalui pembimbingan, pendidikan dan pelatihan.
- Perencanaan Audit Berbasis Risiko (PPBR) dan Audit Kinerja kedalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.
- Menindaklanjuti hasil QA yang telah dilakukan oleh BPKP.

**BAB
III**
PENUTUP

Secara umum Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan tahunan. Untuk melaksanakan peran pengawasan secara optimal, Inspektorat sebagai unit APIP Provinsi menentukan prioritas sasaran pengawasan serta melaksanakan kegiatan pengawasan yang tepat dan relevan sesuai program pengawasan yang telah ditetapkan.

Data Tahun Anggaran 2025 yang diambil dari Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) maka ditetapkan rencana dan realisaasi dari masing-masing kegiatan dengan melihat indikator kinerja yang ditetapkan. Atas perbandingan rencana tingkat capaian (target) dan realisasi maka diperoleh nilai persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing program sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2025 dengan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) terdapat 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Seluruh sasaran telah sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui Renstra pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Palangka Raya, April 2025

INSPEKTUR DAERAH


SARING, SH., MH, CGCAE
Jaksa Utama Muda
NIP.19650510 198703 1 003

LAMPIRAN

Lampiran : Laporan Triwulan I Tahun 2025

Nama OPD : Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

A. Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan I			
					Target	Realisasi	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase tindak lanjut selesai : BKP- RI	%	75	75	78,04	104,05	
		ITJEN Kemendagri/ teknis lainnya	%	75	75	25,76	34,35	
		Inspektorat	%	85	85	83,71	98,48	
2.	Meningkatnya Hasil Transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan daerah	Opini Hasil Pemeriksaan Eksternal	WTP	WTP	-	-	-	
3.	Menurunnya nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai kerugian daerah sesuai hasil pemeriksaan	%	30	30	88,89	296,30	
4.	Meningkatnya perangkat Daerah memperoleh Nilai SAKIP Minimal "B"	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi SAKIP Minimal "B"	% SKPD Nilai LKIP Min B	85	-	-	-	
5.	Meningkatnya Maturitas SPIP Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi <i>control design</i> yang bersifat <i>hard control</i> dan <i>soft control</i>	Tingkat Maturitas	Level 3	-	-	-	
6.	Meningkatnya kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Tingkat leveling APIP Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	Leveling	Level 3	-	-	-	

B. Realisasi Keuangan

Kode Akun	Nama Akun	Pagu	Realisasi			
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Keuangan	(%)	(%)	
	BELANJA	44.953.402.675,00	5.814.178.702,00	12,93	21,05	-
	Belanja Tidak Langsung	25.857.749.228,00	4.346.494.701,00	16,81	24,29	-
6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.857.749.228,00	4.346.494.701,00	16,81	24,29	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.667.970.130,00	1.146.650.900,00	24,56	25,00	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	354.638.520,00	-	-	-	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	542.277.373,00	126.872.764,00	23,40	25,00	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	49.649.394,00	-	-	-	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.820.000,00	24.480.000,00	16,45	25,00	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	900.000.000,00	188.740.000,00	20,97	25,00	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	76.960.000,00	5.180.000,00	6,73	25,00	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	23.310.000,00	-	-	-	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	310.392.120,00	63.946.860,00	20,60	25,00	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24.050.682,00	-	-	-	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	103.476.482,00	27.676.191,00	26,75	25,00	-
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	8.523.282,00	-	-	-	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	838.380,00	15.258,00	1,82	25,00	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	500.000,00	-	-	-	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PNS	622.501.872,00	74.703.083,00	12,00	25,00	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja iuran Jaminan Kesehatan PPPK	23.607.227,00	-	-	-	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.724.854,00	2.063.745,00	17,60	25,00	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	851.132,00	-	-	-	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja iuran Jaminan Kematian PNS	35.174.560,00	6.191.300,00	17,60	25,00	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja iuran Jaminan Kematian PPPK	2.553.397,00	-	-	-	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	51.523.920,00	-	-	-	-
5.1.01.01.12.0002	Belanja iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.140.903,00	-	-	-	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.825.025.000,00	1.352.808.400,00	19,82	25,00	-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	162.000.000,00	-	-	-	-

LKIP TRIWULAN I 2025

Kode Akun	Nama Akun	Pagu	Realisasi			
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Keuangan	(%)	(%)	
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.874.240.000,00	1.327.166.200,00	12,20	25,00	-
5.1.01.02.06.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	35.000.000,00	-	-	-	-
	BELANJA LANGSUNG	19.095.653.447,00	1.467.684.001,00	7,69	16,67	-
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.913.405.519,00	602.197.401,00	-	-	-
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95.000.000,00	9.830.000,00	10,35	13,16	-
6.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00	25,00	-
6.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.000.000,00	-	-	25,00	-
6.01.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.000.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	4.830.000,00	32,20	25,00	-
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	270.000.000,00	-	-	25,00	-
6.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.000.000,00	-	-	25,00	-
6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.900.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.900.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.415.500.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	325.500.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.090.000.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.668.565.519,00	207.664.486,00	5,66	24,81	-
6.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.000.000,00	-	-	-	-
6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.435.000.000,00	-	-	25,00	-
6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	297.600.000,00	37.430.550,00	12,58	25,00	-
6.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	414.918.519,00	116.348.796,00	28,04	25,00	-

LKIP TRIWULAN I 2025

Kode Akun	Nama Akun	Pagu	Realisasi			
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Keuangan	(%)	(%)	
6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.047.000,00	-	-	25,00	-
6.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	-	-	25,00	-
6.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.000.000,00	53.885.140,00	12,68	25,00	-
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.840.000,00	242.857.715,00	20,72	25,00	-
6.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.400.000,00	-	-	25,00	-
6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	290.440.000,00	67.734.585,00	23,32	25,00	-
6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.000.000,00	4.775.000,00	6,37	25,00	-
6.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	800.000.000,00	170.348.130,00	21,29	25,00	-
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.273.600.000,00	141.845.200,00	6,24	6,38	-
6.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.600.000,00	4.467.700,00	13,30	15,00	-
6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.000.000,00	137.377.500,00	24,53	25,00	-
6.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.680.000.000,00	-	-	-	-
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.278.430.000,00	664.895.100,00	10,59	16,93	-
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.270.980.000,00	95.680.000,00	2,24	9,04	-
6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	300.000.000,00	-	-	10,00	-
6.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	805.394.000,00	-	-	-	-
6.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	145.000.000,00	-	-	10,00	-
6.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	1.000.000.000,00	6.980.000,00	0,70	25,00	-
6.01.02.1.01.05	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.653.366.000,00	-	-	-	-
6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	367.220.000,00	88.700.000,00	24,15	25,00	-
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2.007.450.000,00	569.215.100,00	28,36	33,71	-
6.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	647.800.000,00	2.800.000,00	0,43	10,00	-

LKIP TRIWULAN I 2025

Kode Akun	Nama Akun	Pagu	Realisasi			
			Realisasi Keuangan		Fisik	
			Keuangan	(%)	(%)	
6.01.02.1.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.359.650.000,00	566.415.100,00	41,66	45,00	-
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.903.817.928,00	200.591.500,00	7,25	23,83	-
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	136.123.000,00	-	-	-	-
6.01.03.1.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	136.123.000,00	-	-	-	-
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	2.767.694.928,00	200.591.500,00	7,25	25,00	-
6.01.03.1.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	275.200.000,00	4.200.000,00	1,53	25,00	-
6.01.03.1.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	316.200.000,00	-	-	25,00	-
6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	824.982.495,00	-	-	25,00	-
6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1.351.312.433,00	196.391.500,00	14,53	25,00	-